

## ABSTRACT

*The administrative service system during the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic, vaccine certificates were used as an administrative requirement, which reaped many pros and cons. Basically Vaccination is an implementation of the government's good will to tackle the corona virus. The emergence of Presidential Regulation 14 of 2021 requires the public to vaccinate, if they refuse they will receive the sanctions stated in the regulation.*

*Methods the research for this manuscript was carried out systematically and methodologically, using normative research methods. The text approach is carried out using a case approach, statue approach combined with conceptual approach.*

*The results of this study indicate that the vaccine certificate policy is one of the efforts being promoted by the Government to tackle the massive spread of the Covid-19 virus to the public. However, from this research it can also be seen that vaccine certificates are used as a condition for obtaining public services, causing controversy because many people do not actually receive vaccine certificates because they are not available or because they are not allowed to get vaccines for medical reasons, therefore it is necessary to reformulate policies related to vaccine certificates.*

**Keywords:** Vaccine Certificate, Administrative Services, Policy

## ABSTRAK

Sistem pelayanan administrasi pada saat Pandemi *Corona virus Disease* (COVID-19), sertifikat vaksin dijadikan syarat administrasi banyak menuai pro kontra. Pada dasarnya Vaksinasi merupakan implementasi dari iktikad baik pemerintah untuk menanggulangi virus corona. Munculnya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, jika menolak maka akan mendapatkan sanksi yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut.

Metode penelitian untuk skripsi ini dilakukan secara sistematis dan metodologis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sertifikat vaksin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah demi penanggulangan penyebaran virus Covid-19 secara masif kepada masyarakat. Namun dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sertifikat vaksin dijadikan sebagai syarat perolehan pelayanan publik menimbulkan kontroversi sebab banyak masyarakat yang sejatinya tidak mendapat sertifikat vaksin sebab tidak tersediannya maupun karena tidak diperkenankan mendapatkan vaksin sebab medis, oleh karenanya perlu dilakukannya reformulasi kebijakan terkait sertifikat vaksin.

**Kata Kunci :** Sertifikat Vaksin, Pelayanan Administrasi, Kebijakan

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                                            | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                                                              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                                                     | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                          | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                            | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                       | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                        | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                      | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                               | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                    | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                   | 8           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                                 | 9           |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....                                                                                                | 9           |
| 1.4.1Kegunaan Praktis .....                                                                                                 | 9           |
| 1.4.2Kegunaan Teoritis.....                                                                                                 | 9           |
| 1.5 Keaslian Penelitian.....                                                                                                | 9           |
| 1.6 Metode Penelitian.....                                                                                                  | 13          |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....                                                                                                 | 13          |
| 1.6.2Pendekatan Penelitian .....                                                                                            | 14          |
| 1.6.3Sumber Bahan Hukum.....                                                                                                | 14          |
| 1.6.4Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                    | 16          |
| 1.6.5Analisis Bahan Hukum .....                                                                                             | 16          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORI SERTIFIKAT VAKSIN BERDASARKAN<br/>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA<br/>.....</b> | <b>18</b>   |
| <b>2.1 Pelayanan Publik Tentang Kesejahteraan.....</b>                                                                      | <b>18</b>   |
| 2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik .....                                                                                     | 18          |
| 2.1.2 Maksud, Tujuan dan Asas Pelayanan Publik.....                                                                         | 19          |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.3 Ruang Lingkup Pelayanan Publik.....                                       | 22        |
| 2.1.4 Standar Pelayanan Publik .....                                            | 25        |
| 2.2 Tinjauan Yuridis Sertifikat Vaksin .....                                    | 25        |
| 2.2.1 Sertifikat Vaksin di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... | 25        |
| 2.2.2 Analisa Sertifikat Vaksin Berdasarkan HAM .....                           | 28        |
| <b>BAB III KETETAPAN SERTIFIKAT VAKSIN DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK .....</b>  | <b>31</b> |
| 3.1 Hubungan Pengadaan Sertifikat Vaksin Terhadap Proses Pelayanan Publik.....  | 31        |
| 3.2 Ketetapan Sertifikat Vaksin Sebagai Syarat Kebijakan Pelayanan Publik ..... | 38        |
| 3.2.1 Aturan Hukum yang mengatur kewajiban untuk vaksin .....                   | 38        |
| 3.2.2 Adanya Pro dan Kontra Mengenai Vaksin Covid-19 .....                      | 41        |
| 3.2.3 Reformasi Kebijakan Pelayanan Publik Semasa Pandemi .....                 | 47        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                     | <b>54</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                            | 54        |
| 4.2 Saran.....                                                                  | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                     | <b>57</b> |